



Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

Nomor : 036/PW/I/e/III/2025

Semarang, 11 Ramadhan 1446 H

Lampiran : 1 berkas

11 Maret 2025 M

Hal : **Pemberitahuan Rilis Hasil Survei**

Kepada:

Yth. Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Se-Jawa Tengah

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas nikmat dan rahmat-Nya. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan telah selesainya survei yang dilakukan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah, dengan ini kami bermaksud untuk merilis hasil survei tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan advokasi dalam pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Adapun hasil survei ini mencakup berbagai temuan penting terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan, faktor penyebab, serta rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan sebagaimana terlampir.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Albirru Manittaqo

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua

Monica Subastia, S.Pd
KTA.NA. 1112.8222.21093

Sekretaris

Mutmainnah, M.Pd
KTA.NA. 1116.8022.21658

Sekretariat : JL. Singosari Raya 33 Semarang

Web : www.nasyiahjateng.org Email: najatengrahajeng@gmail.com



Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah

Lampiran:

PEMBERITAHUAN HASIL SURVEI ONLINE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah berpandangan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, ekonomi, maupun berbasis digital, terus terjadi dan memberikan dampak yang signifikan terhadap korban. Untuk memahami lebih dalam mengenai kondisi ini, Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah melakukan survei terhadap perempuan berusia 12-65 tahun guna mengidentifikasi pengalaman mereka dalam melihat, mendengar, atau mengalami kekerasan. Berikut adalah uraian hasil survei yang telah dilakukan oleh tim khusus setelah dilakukan pengkajian dan penyajian hasil analisis data:

3 Dari 4 Perempuan di Jawa Tengah pernah menjadi korban, melihat dan mendengar kasus kekerasan terhadap perempuan

- Hasil survei Nasyiah Jateng 2025, menunjukkan 3 dari 4 perempuan usia 12-65 tahun menjadi korban, melihat dan mendengar kasus kekerasan terhadap perempuan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 20 perempuan usia 12-65 tahun pernah menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan itu sendiri.
- Kekerasan psikis dianggap sebagai kekerasan yang paling sering terjadi kepada perempuan dengan total 222 responden, disusul dengan kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi.
- Kekerasan fisik dianggap sebagai kekerasan yang sering dilaporkan daripada kekerasan seksual dan kekerasan psikis.
- Pasangan cenderung memiliki potensi yang tinggi menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan.

1. Data Pengalaman Responden dalam Melihat, Mendengar dan Menjadi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PWNA Jawa Tengah pada 24 Februari 2025 hingga 6 Maret 2025, ditemukan bahwa 75% dari 321 responden mengaku pernah menjadi korban, melihat, atau mendengar kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, 25% responden menyatakan tidak pernah mengalami atau mengetahui kejadian tersebut. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan yang signifikan di Jawa Tengah, dengan mayoritas responden memiliki pengalaman langsung atau tidak langsung terhadap isu ini. Temuan ini mencerminkan perlunya perhatian lebih dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam aspek pelaporan, advokasi, serta perlindungan korban.

Melihat tingginya angka kejadian kekerasan terhadap perempuan, berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan, perlu memperkuat langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah dapat meningkatkan akses terhadap layanan pendampingan hukum dan psikososial bagi korban, serta memperketat penegakan hukum terhadap pelaku. Organisasi seperti Nasyiatul Aisyiyah dapat memperluas program edukasi mengenai kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan serta mendorong budaya melaporkan kasus kekerasan agar tidak ada lagi korban yang takut atau enggan mencari keadilan.

Sekretariat : JL. Singosari Raya 33 Semarang

Web : www.nasyiahjateng.org Email: najatengrahajeng@gmail.com



Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah

2. Data Potensi Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan hasil survei, 95% dari 321 responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan, sementara 5% lainnya mengakui pernah melakukan tindakan tersebut. Meskipun persentase pelaku relatif kecil, fakta bahwa ada individu yang mengakui pernah melakukan kekerasan tetap menjadi perhatian serius. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terjadi, baik secara sadar maupun tidak, dan memerlukan upaya lebih lanjut dalam pencegahan serta edukasi mengenai dampak buruk dari tindakan tersebut. Data ini juga dapat mengindikasikan bahwa beberapa individu mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka termasuk dalam kategori kekerasan, yang menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran mengenai bentuk-bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis.

Untuk menekan angka kekerasan lebih lanjut, diperlukan intervensi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi sosial, dan institusi pendidikan. Program edukasi mengenai kesetaraan gender dan dampak kekerasan terhadap perempuan harus diperkuat, terutama di lingkungan keluarga dan sekolah. Selain itu, kampanye kesadaran sosial dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat agar lebih menghargai hak-hak perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan. Lembaga hukum juga perlu menegakkan regulasi dengan lebih tegas untuk memastikan pelaku mendapatkan konsekuensi yang sesuai serta mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.

3. Kekerasan Terhadap Perempuan yang Paling Sering Terjadi

Berdasarkan hasil survei, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi di lingkungan responden adalah kekerasan psikis (222) dan kekerasan fisik (203). Ini menunjukkan bahwa selain tindakan kekerasan yang tampak secara fisik, bentuk kekerasan yang bersifat emosional seperti intimidasi, manipulasi, dan perundungan juga sangat umum terjadi. Kekerasan ekonomi (122) dan kekerasan seksual (117) juga cukup signifikan, menegaskan bahwa perempuan masih rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan struktural dan pelecehan seksual. Selain itu, kekerasan berbasis digital seperti kekerasan seksual online (93) dan perundungan online (57) juga semakin menjadi ancaman, menunjukkan bahwa ruang digital bukan tempat yang sepenuhnya aman bagi perempuan.

Melihat data ini, langkah pencegahan harus lebih menyeluruh dengan menargetkan berbagai bentuk kekerasan, tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis dan ekonomi yang sering kali tidak terlihat. Pemerintah dan organisasi sosial perlu memperkuat edukasi mengenai dampak buruk kekerasan psikis dan pentingnya membangun lingkungan yang sehat secara mental bagi perempuan. Selain itu, perlu adanya penguatan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, baik secara langsung maupun di ruang digital, untuk mencegah semakin meluasnya kasus pelecehan. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam memberikan dukungan terhadap korban dan menciptakan budaya yang lebih menghargai perempuan serta menolak segala bentuk kekerasan di berbagai aspek kehidupan.

4. Kekerasan Terhadap Perempuan yang Paling Sering Dilaporkan

Berdasarkan hasil survei, kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering dilaporkan di lingkungan responden, dengan pemilih sebanyak 237. Ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik lebih mudah dikenali dan mungkin memiliki bukti yang lebih nyata dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya. Sementara itu, kekerasan psikis dan kekerasan seksual masing-masing dilaporkan oleh 140 responden, menunjukkan bahwa kedua jenis kekerasan

Sekretariat : JL. Singosari Raya 33 Semarang

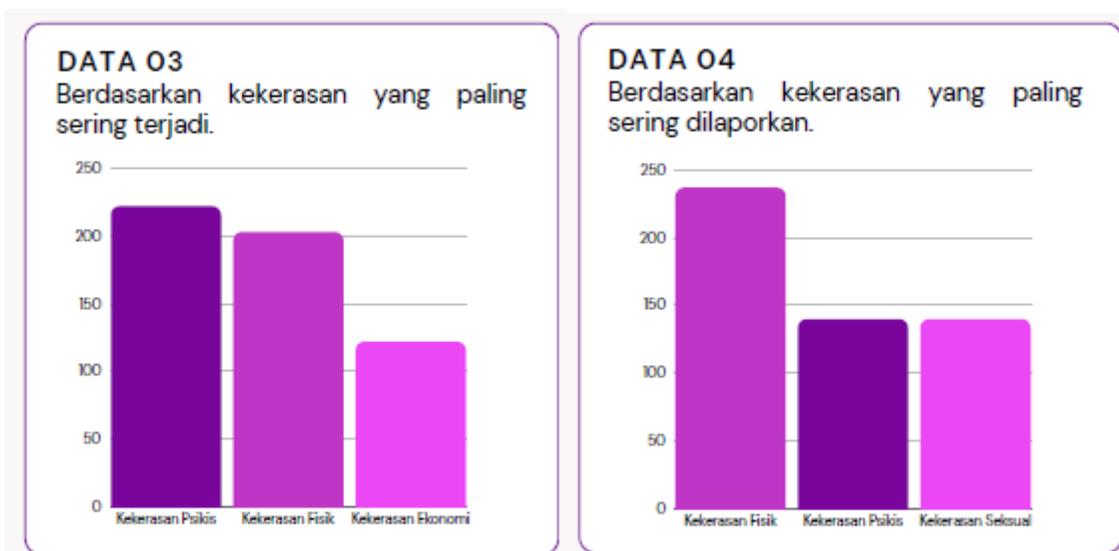
Web : www.nasyiahjateng.org Email: najatengrahajeng@gmail.com



Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah

ini juga cukup sering diadakan meskipun dampaknya mungkin tidak langsung terlihat secara fisik. Disusul kekerasan seksual online 76, kekerasan ekonomi 72, dan perundungan online 41 memiliki angka pelaporan yang lebih rendah, yang bisa jadi karena kurangnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan ini atau karena korban merasa takut atau enggan melaporkannya.

Dibandingkan dengan data pertanyaan sebelumnya mengenai jenis kekerasan yang paling sering terjadi, ada perbedaan mencolok dalam tingkat pelaporan. Misalnya, kekerasan psikis (69,2%) dan kekerasan ekonomi (38%) lebih banyak dianggap terjadi, tetapi tingkat pelaporannya lebih rendah dibandingkan kekerasan fisik. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa banyak korban mengalami kesulitan dalam melaporkan kekerasan yang bersifat non-fisik, baik karena kurangnya bukti maupun karena norma sosial yang membuat korban merasa malu atau takut mendapatkan stigma. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan sistem dukungan yang lebih kuat agar korban merasa aman dan didukung untuk melaporkan segala bentuk kekerasan yang mereka alami.



5. Kekerasan Terhadap Perempuan yang Paling Jarang Dilaporkan

Berdasarkan data survei, kekerasan yang paling jarang dilaporkan adalah kekerasan ekonomi (147), kekerasan seksual online (139), dan perundungan online (133). Hal ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang tidak bersifat fisik atau tidak meninggalkan bukti konkret cenderung lebih sulit untuk dilaporkan. Korban mungkin merasa ragu untuk melaporkan karena minimnya pemahaman mengenai hak-hak mereka, ketakutan akan dampak sosial, atau kurangnya mekanisme perlindungan yang memadai. Kekerasan psikis juga memiliki tingkat pelaporan yang rendah (131), meskipun dalam survei sebelumnya disebut sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi.

Sebaliknya, kekerasan fisik (52) adalah bentuk kekerasan yang paling jarang masuk dalam kategori tidak dilaporkan, yang selaras dengan data pada pertanyaan sebelumnya bahwa kekerasan fisik justru menjadi yang paling sering dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan yang memiliki bukti nyata lebih mudah untuk diajukan dibandingkan dengan kekerasan yang bersifat psikologis atau berbasis teknologi. Rendahnya pelaporan terhadap kekerasan non-fisik ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran, edukasi, serta sistem pelaporan yang lebih ramah korban agar mereka merasa lebih aman dan didukung dalam menyuarakan pengalaman mereka.

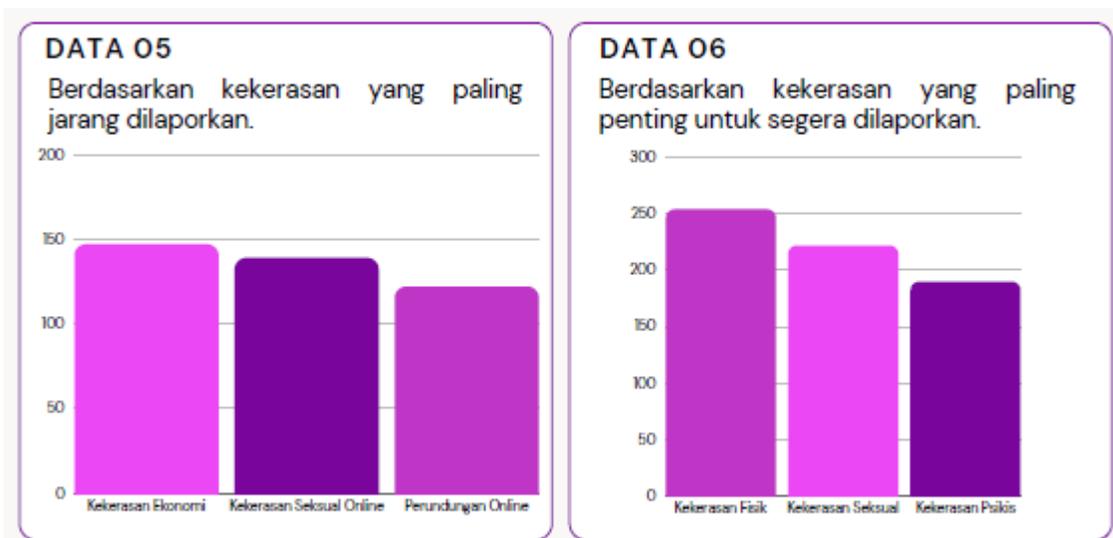


Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah

6. Kekerasan Terhadap Perempuan yang Paling Penting untuk Segera Ditangani

Berdasarkan hasil survei, tiga jenis kekerasan yang dianggap paling penting untuk segera ditangani adalah kekerasan fisik (254), kekerasan seksual (222), dan kekerasan psikis (190). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memprioritaskan bentuk kekerasan yang memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap korban, baik secara fisik maupun mental. Kekerasan fisik menempati posisi teratas karena dampaknya yang nyata dan dapat membahayakan nyawa korban, sementara kekerasan seksual juga menjadi perhatian utama karena berhubungan dengan trauma psikologis yang mendalam. Kekerasan psikis, meskipun tidak selalu terlihat secara fisik, tetap diakui sebagai bentuk kekerasan serius yang membutuhkan perhatian segera.

Di sisi lain, kekerasan ekonomi (70), kekerasan seksual online (91), dan perundungan online (25) memiliki persentase yang lebih rendah dalam hal prioritas penanganan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa bentuk-bentuk kekerasan ini masih kurang dipahami atau dianggap memiliki dampak yang tidak sebesar kekerasan fisik dan seksual. Namun, rendahnya angka prioritas ini juga bisa mencerminkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari kekerasan berbasis ekonomi dan digital. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, kekerasan seksual dan perundungan online juga seharusnya menjadi perhatian agar tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan.



7. Potensi Tinggi Lokasi Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan hasil survei, tempat yang paling sering terjadi kekerasan terhadap perempuan adalah rumah (215), lingkungan sekitar rumah (157), dan tempat kerja (127). Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sering kali terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi mereka, seperti rumah dan tempat tinggal. Fakta bahwa rumah menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah besar. Selain itu, lingkungan sekitar rumah dan tempat kerja juga menjadi area rentan, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pengawasan, budaya patriarki, atau minimnya kesadaran hukum dan perlindungan bagi korban.

Selain itu, sekolah (111), area publik (125), dan boarding school (88) juga termasuk dalam daftar lokasi yang cukup sering terjadi kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan dan tempat umum belum sepenuhnya aman dari tindak kekerasan. Sementara itu, tempat ibadah (5), kampus universitas (1), dan media sosial (1) memiliki persentase yang lebih rendah, yang bisa menunjukkan bahwa kasus kekerasan di tempat-tempat tersebut jarang terdeteksi atau dilaporkan. Namun, rendahnya angka ini bukan berarti kekerasan tidak terjadi di



Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah

sana, melainkan bisa jadi disebabkan oleh faktor ketertutupan korban atau kurangnya kesadaran untuk melaporkan kejadian tersebut.

8. Potensi Tinggi Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan hasil survei, pelaku kekerasan terhadap perempuan yang paling berpotensi adalah pasangan (234), keluarga seperti ayah, ibu, atau saudara kandung (227), dan teman sebaya (156). Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung atau pendukung mereka. Tingginya angka kekerasan dari pasangan yang belum menikah mengindikasikan adanya dinamika hubungan yang tidak sehat, seperti kontrol berlebihan, manipulasi emosional, atau kekerasan fisik dalam hubungan pacaran. Sementara itu, fakta bahwa keluarga juga menjadi pelaku utama menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih mengakar dalam lingkungan rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun ekonomi.

Selain itu, tetangga (101), tokoh masyarakat (41), dan guru/dosen (40) juga muncul sebagai pelaku potensial kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada lingkup keluarga dan hubungan personal, tetapi juga bisa terjadi dalam lingkungan sosial dan pendidikan. Sementara itu, tokoh agama (15) dan rekan kerja (3) memiliki persentase yang lebih rendah, meskipun masih ada kemungkinan kekerasan terjadi di lingkungan tersebut. Data ini menggarisbawahi pentingnya upaya pencegahan, edukasi, dan advokasi untuk mengubah budaya kekerasan yang sering kali dianggap normal dalam hubungan interpersonal dan keluarga.

9. Lembaga/ Pos Pengaduan yang Paling Mudah Diakses pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan hasil survei, lembaga atau pos pengaduan yang paling mudah diakses oleh masyarakat ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan adalah RT/RW (174), kepolisian (142), dan tokoh agama atau tokoh masyarakat (130). Hal ini menunjukkan bahwa struktur komunitas lokal masih menjadi tempat utama bagi korban untuk mencari pertolongan, baik melalui perangkat desa seperti RT/RW maupun figur publik yang dihormati. Kepercayaan terhadap kepolisian sebagai tempat pengaduan juga cukup tinggi, meskipun masih ada kesenjangan antara aksesibilitas formal dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, guru BK atau kepala sekolah (124) serta lembaga bantuan hukum dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) masing-masing mendapatkan 63 suara, yang menandakan bahwa lingkungan pendidikan dan advokasi hukum juga memiliki peran dalam menangani kasus kekerasan. Namun, angka yang relatif lebih rendah untuk lembaga swadaya masyarakat (50) dan Satgas Kekerasan Seksual (30) menunjukkan bahwa lembaga khusus yang berfokus pada perlindungan perempuan mungkin masih kurang dikenal atau sulit diakses oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya peningkatan sosialisasi, edukasi, dan keterjangkauan layanan pengaduan sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan bantuan yang cepat dan tepat.

10. Pelayanan yang Diharapkan pada Lembaga/Pos Pengaduan

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden berharap lembaga atau pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dapat memberikan kenyamanan (261) dan pelayanan yang ramah terhadap korban (81261). Hal ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan emosional sangat penting dalam proses pelaporan, di mana korban menginginkan suasana yang aman dan tidak

Sekretariat : JL. Singosari Raya 33 Semarang

Web : www.nasyiahjateng.org Email: najatengrahajeng@gmail.com



Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah

mengintimidasi ketika melaporkan kejadian yang mereka alami. Selain itu, permintaan akan layanan yang berpihak kepada korban (150) menegaskan bahwa masyarakat menginginkan pendekatan yang tidak menyalahkan korban (victim-blaming) dan lebih mendukung mereka secara holistik.

Selain kenyamanan dan keberpihakan, kerahasiaan identitas juga menjadi faktor penting yang diharapkan oleh 229 suara. Hal ini mencerminkan kekhawatiran korban terhadap stigma sosial dan potensi ancaman dari pelaku jika identitas mereka diketahui. Di sisi lain, jawaban lainnya seperti kontak pengaduan darurat, keamanan ekstra, dan pendampingan psikologis masing-masing hanya mendapat (1), yang mengindikasikan bahwa meskipun aspek-aspek tersebut penting, mereka masih kurang menjadi prioritas dibandingkan faktor-faktor utama seperti kenyamanan, pelayanan ramah, dan perlindungan privasi korban. Oleh karena itu, lembaga pengaduan perlu mengutamakan pendekatan yang lebih humanis dan empatik untuk mendukung korban dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami.

11. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei dari 10 pertanyaan yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu yang signifikan di masyarakat, dengan berbagai bentuk kekerasan yang paling banyak dialami meliputi kekerasan verbal, fisik, dan psikologis. Mayoritas responden mengakui bahwa lingkungan terdekat seperti keluarga, pasangan tidak sah, dan teman sebaya merupakan pihak yang paling berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan adalah ketimpangan gender, budaya patriarki, dan minimnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kekerasan.

Dari sisi pelaporan dan penanganan kasus kekerasan, survei menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengandalkan institusi seperti kepolisian, RT/RW, dan tokoh agama/masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Namun, masih terdapat tantangan dalam aksesibilitas dan efektivitas layanan yang tersedia. Harapan utama responden terhadap lembaga pengaduan adalah adanya pelayanan yang ramah dan berpihak kepada korban, serta jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas mereka. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran, edukasi, dan kebijakan yang lebih tegas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para korban.

Rilis hasil survei ini disusun oleh tim dari **Departemen Advokasi dan Kebijakan Publik PWNA Jawa Tengah** sebagai bentuk kepedulian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan di wilayah ini. Kami berharap temuan ini dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak dalam mengambil langkah konkret untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Melalui rilis hasil survei ini, PWNA Jawa Tengah ingin mendorong peningkatan kesadaran masyarakat serta mendorong berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi sosial, dan institusi pendidikan, untuk mengambil langkah nyata dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya data yang lebih komprehensif, diharapkan kebijakan serta upaya advokasi yang lebih efektif dapat dilakukan guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan di Jawa Tengah.

Tim Departemen Advokasi dan Kebijakan Publik PWNA Jawa Tengah

Yashinta Rizky Ananda

Prasasti Nugrahaning Gusti

Inayatur Rosyidah

Delta Rosiana

Jasmina Zahra

Sekretariat : JL. Singosari Raya 33 Semarang

Web : www.nasyiahjateng.org Email: najatengrahajeng@gmail.com